

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 2637/Pid.B/2010/PN.SBY )**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh :**

**NI KETUT SRI WIJAYANTI**  
**NPM. 0671010024**

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2011**

**LEMBAR PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(STUDI KASUS PUTUSAN PN Nomor : 2673/Pid.B/2010/PN.SBY)**

**Disusun Oleh :**

**NI KETUT SRI WIJAYANTI**  
**NPM. 0671010024**

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 1960 1212 19880 31001**

**Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.**  
**NPT. 375 070 70 225**

**Mengetahui**  
**DEKAN**

**Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 1962 0625 19910 31001**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(STUDI KASUS PUTUSAN PN Nomor : 2673/Pid.B/2010/PN.SBY)**

**Disusun Oleh :**

**NI KETUT SRI WIJAYANTI**  
**NPM. 0671010024**

**Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada Tanggal : 10 Juni 2011**

**Tim Penguji :**

1. **Haryo Sulistiyantoro, S.H, MM.,**  
**NIP. 1962 0625 19910 31001** (.....)
2. **H. Sutrisno. S.H., M.Hum.,**  
**NIP. 1960 1212 19880 31001** (.....)
3. **Subani. S.H., M.Si.,**  
**NIP. 1951 0504 19830 31001** (.....)

**Mengetahui**

**DEKAN**

**Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 1962 0625 19910 31001**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(STUDI KASUS PUTUSAN PN Nomor : 2673/Pid.B/2010/PN.SBY)**

**Disusun Oleh :**

**NI KETUT SRI WIJAYANTI**  
**NPM. 0671010024**

**Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

**Tim Penguji :**

4. **Haryo Sulistiyantoro, S.H, MM.,**  
NIP. 1962 0625 19910 31001 (.....)
5. **H. Sutrisno. S.H., M.Hum.,**  
NIP. 1960 1212 19880 31001 (.....)
6. **Subani. S.H., M.Si.,**  
NIP. 1951 0504 19830 31001 (.....)

**Mengetahui**

**DEKAN**

**Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 1962 0625 19910 31001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Ketut Sri Wijayanti  
Tempat/ Tgl Lahir : Surabaya, 13 Maret 1988  
NMP : 0671010024  
Konsentrasi : Pidana  
Alamat : Pulosari IIIj No. 50c.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor: 2637/Pid.B/2010/PN.SBY)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui

KaProdi

Surabaya, 10 Juni 2011

Penulis

Subani SH.,MSi  
NIP. 1951 0504 19830 31001

Ni Ketut SriWijayanti  
NPM. 0671010024

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Di sini penulis mengambil judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PN Nomor : 2673/Pid.B/2010/PN.SBY)”**.

Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Di samping itu diharapkan dapat memberikan bekal penulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan oleh beberapa pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur selaku dosen Pembimbing Utama yang selalu memberi kemudahan dan solusi kepada penulis.

3. Bapak Subani, S.H, M.Si, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H, M.Kn selaku dosen pembimbing pendamping yang selalu memberikan dukungan, masukan, kesabaran dalam memberikan pengarahan terhadap penulis.
5. Pak Eko Wahyudi, S.H, Pak Fauzul, S.H, M.Hum, Bu Yana Indawati, S.H, M.Kn, Bu Mas Anienda Tien F, S.H, M.H. yang sabar memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen program studi Ilmu Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Seluruh Staf dan TU Fakultas Hukum yang sabar dan ramah dalam melayani mahasiswa.
8. Untuk Bapak dan Ibunda (alm), tercinta sebagai orang tua yang selalu sabar membimbingku dengan kasih sayang yang selalu memberikan dukungan, doa serta dorongan baik moril maupun materiil.
9. Untuk kakak-kakakku, kakak iparku dan adik-adikku, serta saudara-saudaraku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas doanya, dan bimbingannya.
10. Seluruh teman-teman mahasiswa semuanya yang khususnya satu angkatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan, motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai.
11. Dan yang terakhir untuk Yudha yang penulis sayangi terima kasih atas doanya dan motivasinya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan sehingga skripsi ini layak dan dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Juni 2011

penulis





## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>ABSTRAKSI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Kajian Pustaka.....	7
1.5.1 Perlindungan Anak.....	7
1.5.1.1 Pengertian Anak.....	8
1.5.1.2 Persyaratan Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak.....	9

1.5.1.3 Penyebab dan Akibat Kekerasan Terhadap Anak.....	13
1.5.1.4 Prinsip-prinsip Perlindungan Anak.....	14
1.5.1.5 Hak-Hak Dan Kewajiban Anak.....	17
1.5.1.6 Hak-hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	19
1.5.1.7 Hak-hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	21
1.5.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	23
1.5.2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	23
1.5.2.2 Hak-hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	23
1.5.3 Perlindungan hukum.....	24
1.5.3.1 Pengertian upaya hukum.....	25
1.5.3.2 Pengertian Korban.....	27
1.5.3.3 Pengertian Penganiayaan.....	27
1.5.4 Ketentuan Pidana.....	27
1.5.4.1 Menurut KUHP pasal 351 tentang Penganiayaan.....	27
1.5.4.2 Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 PKDRT tentang sanksi pidana penganiayaan.....	28
1.5.4.3 Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak tentang sanksi pidana penganiayaan.....	28
1.6 Metode Penelitian.....	29

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian.....	29
1.6.2 Sumber Data.....	30
1.6.3 Bahan Hukum Sekunder.....	31
1.6.4 Bahan Hukum Tersier.....	31
1.7 Metode pengumpulan dan pengolahan data.....	32
1.7.1 Metode Pengumpulan Data.....	32
1.7.2 Metode Analisis Data.....	32
1.7.3 Lokasi Penelitian.....	32
1.8 Waktu Penelitian.....	32
1.9 Sistematika Penulisan.....	33
 <b>BAB II PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK</b>	
<b>KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA</b>	
<b>(KDRT).....</b>	<b>35</b>
2.1 Identifikasi Perkara.....	35
2.1.1 Duduk Perkara.....	36
2.1.2 Dakwaan Jaksa.....	37
2.1.3 Amar Putusan.....	37
2.1.4 Pertimbangan hukum pengadilan Surabaya.....	38
2.2 Analisa.....	39
2.2.1 Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Anak.....	45
 <b>BAB III BENTUK UPAYA HUKUM ANAK SEBAGAI</b>	
<b>KORBAN KDRT.....</b>	
3.1 Mediasi.....	49

3.2 Banding.....	51
3.3 Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	52
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>



## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 2.1 Kekerasan terhadap Anak sepanjang Tahun 2010 di LSM.....	42
Tabel 3.1 Kekerasan terhadap Anak sepanjang Tahun 2010 di LPA.....	44
Tabel 4.1 Kekerasan terhadap Anak sepanjang Tahun 2010 di Polrestabes .....	44



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian BAKESBANGPOL

Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian Pengadilan Negeri Surabaya.

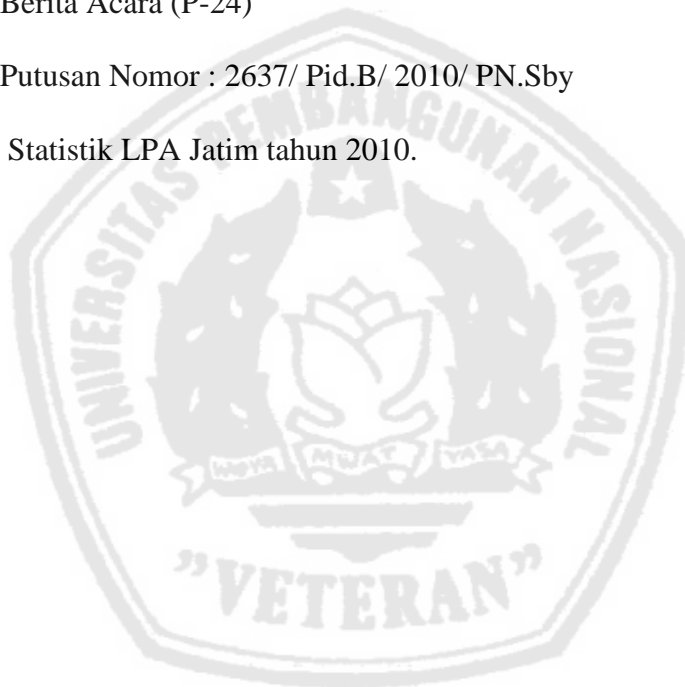
Lampiran 3. Dakwaan Nomor : PDM-943/ Ep.2/ 09/2010

Lampiran 4. Tuntutan Pidana (P-42)

Lampiran 5. Berita Acara (P-24)

Lampiran 6. Putusan Nomor : 2637/ Pid.B/ 2010/ PN.Sby

Lampiran 7. Statistik LPA Jatim tahun 2010.



**Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

**Fakultas Hukum**

Nama Mahasiswa : Ni Ketut Sri Wijayanti  
NPM : 0071010024  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 13 Maret 1988  
Program Studi : Strata (S-1)  
Judul Skripsi :

**Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

**Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang**

**Perlindungan Anak**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PN Nomor : 2673/Pid.B/2010/PN.SBY)**

**Abstraksi**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan upaya hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah berlaku selama 9 (sembilan) tahun tetapi kekerasan terhadap anak tidak menyurut bahkan dari data yang terpantau di LSM Crisis Center Cahaya Mentari Surabaya terlihat semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban KDRT dapat dilakukan dengan melalui perlindungan sementara dari pihak LSM dan masyarakat setempat setelah itu dapat melalui pihak PPA yang ada di polrestabes seperti kasus David anak berusia 6 (enam) tahun.

Tetapi usaha perlindungan hukum dan HAM terhadap anak tidak hanya cukup dengan konsep tetapi harus diterapkan dalam praktik yang nyata. Juga adanya upaya-upaya yang dapat melindungi anak dari kekerasan yang terjadi, khususnya bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) upaya hukum anak korban KDRT juga dapat dilakukan dengan cara mediasi antara antara korban dengan tersangka dan pihak keluarga sebagai penengah.

*Kata kunci : Perlindungan hukum dan upaya hukum bagi anak korban KDRT*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap orang berkeinginan untuk membentuk sebuah rumah tangga dengan ikatan perkawinan, dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan yaitu :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat pun tak luput dari aturan-aturan dan /atau hukum yang ditentukan baik oleh Negara ataupun oleh masyarakat dan agama. Contoh nyata dari penerapan aturan dan /atau hukum pada lingkungan pada keluarga adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi dasar tata laksana perkawinan yang sah, menurut hukum keluarga dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat (4) diartikan sebagai kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.

Ruang lingkup dalam rumah tangga yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 2 ayat (1) Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

- a. suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan



darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945,<sup>1</sup> dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi juga penelantaran.

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>2</sup>

Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Ketentuan Umum.

<sup>2</sup> Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, 2009, h.1

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Berlakunya manusia itu sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak.<sup>3</sup>

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hal ini akibat dari orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka. Orang tua tidak memperdulikan keselamatan anaknya, sepanjang ia dapat memberikan keuntungan finansial bagi keluarga. Di kota-kota besar, anak di eksploitasi untuk bekerja menafkahi keluarga.

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Orang tua sampai memarahi anaknya hingga sampai memukul dengan sabuk, sapu dan benda-benda lainnya. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. h. 117

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. h.12

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi terhadap anak saja tetapi terhadap kaum wanita juga, kekerasan tidak hanya meliputi fisik psikis, faktor ekonomi juga kekerasan seksual. Kebanyakan pelaku adalah orang terdekat seperti suaminya, orang tua, maupun saudara-saudaranya. Berbagai bentuk kekerasan rumah tangga yang terjadi tentu saja menimbulkan berbagai dampak negatif bagi wanita dan anak-anak. Kekerasan fisik umumnya berakibat langsung dan dapat dilihat mata seperti cidera, luka, cacat pada tubuh dan atau kematian. Kekerasan emosional atau psikologis umumnya sulit terlihat dan jarang diperhatikan tetapi membawa dampak yang jauh lebih serius dibanding bentuk kekerasan yang lain. Akibat psikis ringan yang dialami antara lain ketakutan, perasaan malu, terhina dan terasing. Sedangkan akibat psikis yang lain yang dialami antara lain perasaan rendah diri, hilangnya konsep diri dan kehilangan rasa percaya diri. Akibat-akibat psikis tersebut tentu saja tidak baik bagi perkembangan mental para wanita karena menghambat potensi-potensi diri yang seharusnya berkembang.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi)

disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik).<sup>5</sup>

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU No. 39 tahun 1999) dan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut UU No. 23 tahun 2002) dan terakhir dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat UU No. 23 tahun 2004). Peraturan-peraturan perundang-undangan diatas banyak mengatur tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, namun perlindungan terhadap hak-hak anak masih memerlukan penanganan serius karena bersifat lebih spesifik.

Kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan tren peningkatan. Lembaga Perlindungan Anak Jawa timur mencatat hingga akhir 2009 ada 85 korban. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat sampai akhir 2010.<sup>6</sup>

Kekerasan yang terjadi yang menimpa anak terutama yang terjadi dilingkungan rumah tangga dan dilakukan oleh orang-orang terdekat dari anak tersebut, diperlukan perangkat hukum yang dapat melindungi hak-hak anak karena kekerasan terhadap anak adalah tindak kejahatan yang terselubung dan kebanyakan kasus yang sering tidak terlihat dan tidak dilaporkan, walaupun terungkap biasanya jika sudah ada yang mengalami perlukaan yang parah atau

---

<sup>5</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. h. 1

<sup>6</sup> Surya, Senin 08 November 2010, h.10

bahkan meninggal. Pelaku kekerasan biasanya adalah orang yang dekat dengan anak. Sehingga sulit untuk memantau apa yang terjadi di rumah, di lembaga-lembaga dan di sekolah.

## **1.2. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan pada uraian di atas, maka ada dua rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban KDRT dalam kasus David?
2. Bagaimana bentuk upaya hukum anak sebagai korban KDRT dalam kasus David ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban KDRT.
2. Untuk mengetahui bentuk upaya hukum anak sebagai korban KDRT.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

1. Untuk pengembangan ilmu hukum khususnya dalam kajian perlindungan hukum bagi anak korban KDRT.
2. Memberikan wacana bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam penerapan hukum pada kasus KDRT dalam kaitannya dengan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak dalam menindak perlakuan KDRT oleh orang tuanya.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dan Kejaksaan diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum secara maksimal.
2. Bagi orang tua pelaku tindak KDRT agar dapat mengetahui dan memahami bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang berlawanan dengan hukum.
3. Bagi pihak Pengadilan dan para Hakim agar dapat memberikan putusan yang sesuai dengan pasal yang berlaku sesuai dengan peraturan undang-undang.

### 1.5 Kajian Pustaka

#### 1.5.1 Perlindungan Anak

Negara memberikan perlindungan hukum bagi anak, hal ini termaktub dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang telah diamandemen yang isinya adalah :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :<sup>7</sup>

1. Luas lingkup perlindungan :
  - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.

---

<sup>7</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung 2008. h. 35

- b. Meliputi hal-hal yang jasamani dan rohani.
  - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan :
- a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
  - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
  - c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat berkaitan dengan usaha perlindungan anak ini adalah dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memberikan perlindungan kepada anak adalah dengan mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

#### **1.5.1.1 Pengertian Anak**

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### 1.5.1.2 Persyaratan Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak

Anak memiliki posisi dan peran penting sebagai bagian dari anggota masyarakat. sebagai sumber daya manusia dan potensi penerus cita-cita bangsa dan karenanya kepada mereka diupayakan untuk memperoleh tingkat kesejahteraan yang optimal baik mental/rohani, jasmani maupun kehidupan sosialnya.

Pelaksanaan perlindungan anak yang baik harus memenuhi persyaratan yang sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak.
2. Perlindungan anak harus dilakukan bersama antara setiap warganegara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama.
3. Kerjasama dan koordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat antar para partisipan yang bersangkutan.

---

<sup>8</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta 1989.h. 19



4. Dalam membuat kebijakan dan rencana kerja perlu diusahakan inventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak.
5. Perlu adanya kepastian hukum dalam upaya perlindungan anak dengan mengutamakan perspektif yang diatur dan bukan yang mengatur.
6. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
7. Mengupayakan pemberian kemampuan dan kesempatan pada anak untuk ikut serta melindungi diri sendiri.
8. Perlindungan anak yang baik harus mempunyai dasar-dasar filosofi, etis dan yuridis.
9. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada yang bersangkutan, oleh karena adanya penimbunan penderitaan, kerugian oleh partisipan tertentu.
10. perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam pasal 21 UU No. 23 Tahun 2002 yaitu :

Pasal 21 :

“Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan atau mental”.

Sedangkan menurut pasal 22 memberikan pengertian :

Pasal 22 :

“Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.

Penjelasan tentang penjaminan hidup anak tertadap dalam pasal 23 yang isinya adalah :

“Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak”.

Mengenai hak anak dalam mengeluarkan pendapat terdapat dalam pasal 24 yaitu :

“Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *convention of the right* (konvensi tentang pengesahan hak-hak anak). Maka terdapat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam hubungannya

dengan aktualisasi hak-hak anak. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah:<sup>9</sup>

1. Memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk diskriminasi hukum;
2. Memberikan jaminan perawatan kesehatan, jaminan keselamatan dan jaminan kesejahteraan;
3. Memberikan jaminan hak hidup, jaminan hak berkembang kepada anak;
4. Memberikan jaminan status kewarganegaraan kepada anak;
5. Memberikan jaminan kebebasan kepada anak untuk berpendapat, berpikir dan berkeyakinan terhadap keyakinan sesuatu agama;
6. Memberikan jaminan kepada anak untuk berkumpul (berorganisasi) dan berserikat untuk mengeluarkan pendapat;
7. Memberikan jaminan kepada anak untuk mengakses segala macam informasi yang diperlukan;
8. Memberikan jaminan perlindungan kepada anak terhadap segala jenis kekerasan fisik, mental, penyalagunaan kekuasaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalagunaan atau pelecehan seksual;
9. Memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat-menyurat atas serangan yang tidak sah);
10. Mengambil alih tanggung jawab terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua;
11. Memberikan jaminan terhadap anak yang berstatus sebagai pengungsi;
12. Memberikan jaminan khusus terhadap anak yang tidak normal (cacat);
13. Memberikan jaminan pelayanan kesehatan, jaminan sosial (asuransi), jaminan kesejahteraan bagi pengembangan fisik, mental dan sosial anak;
14. Memberikan dan menyediakan sarana rekreasi dan bermain bagi anak;
15. Memberikan jaminan atas perlakuan eksploitasi ekonomi terhadap anak;
16. Memberikan jaminan perlindungan terhadap penculikan dan perdagangan anak;
17. Mengusahakan jenis hukuman yang manusiawi demi kesejahteraan anak;
18. Memberikan jaminan terhadap adanya penyiksaan yang tidak semestinya;
19. Mengusahakan terbrntuknya hukum acara peradilan anak;

---

<sup>9</sup> Waluyadi, *op cit*, h.12

20. Memberikan jaminan terhadap perolehan bantuan hukum bagi anak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

### 1.5.1.3 Penyebab dan Akibat Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak seringkali terjadi bahkan dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan, tercatat 17 (tujuh belas) kasus, dan ada beberapa faktor penyebab dan akibat kekerasan yang menimpa anak itu sendiri yang dapat dilakukan oleh ruang lingkup orang terdekat mereka seperti orang tuanya, bahkan saudara-saudaranya.

#### 1. Penyebab munculnya kekerasan

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya perilaku kekerasan yaitu :<sup>10</sup>

- a. Dendam, yang umumnya bersumber dari adanya perlakuan kekerasan yang pernah diterima oleh pelaku. Perasaan sakit dan terhina dari korban memunculkan kemarahan, sehingga mendorong korban melampiaskan dalam bentuk perilaku yang sama. Pelampiasan kepada orang lain memunculkan kekerasan yang baru, korban berperan sebagai pelaku, dengan korbannya adalah orang lain.
- b. Stabilitas emosi yang rendah, sehingga adanya tekanan emosi (stress) yang tidak mampu ditoleransi lagi oleh pelaku, menyebabkan hilangnya kendali diri. Akibatnya pelaku mudah tersulut emosinya oleh persoalan yang sepele, termasuk dalam menghadapi perilaku-perilaku korban
- c. Cara mendidik anak yang otoriter dan menggunakan cara kekerasan sehingga menjadi model bagi anak dalam berperilaku. Orang tua yang otoriter cenderung menggunakan aturan-aturan kaku dalam mendidik anak. Pelanggaran oleh anak akan dihadapi orang tua dengan hukuman yang keras
- d. Tradisi, yang dirasakan sebagai keharusan untuk dilaksanakan. Hal ini biasanya muncul pada institusi tertentu yang mewajibkan adanya kekerasan. Seperti Orientasi Pengenalan Kampus (Ospek)

---

<sup>10</sup> <http://girjay.blog.friendster.com/2007/04/anak-sebagai-obyek-kekerasan/#ftnref17>.

Seto Mulyadi Pukul: 11.00 Wib, tanggal 20 September 2010. Hari Senin

di sekolah, cenderung mengeksplorasi ketakutan pada siswa baru melalui hukuman atau acara-acara yang keras.

- e. Modeling yang diperoleh dari media massa, seperti adegan kekerasan di televisi, cerita silat dan *games action* (permainan-permainan yang memuat aksi kekerasan). Contoh dari media menjadi model yang paling cepat ditiru oleh individu karena kemajuan teknologi memudahkan akses terhadap media-media ini.

## 2. Akibat Kekerasan

Munculnya kekerasan menimbulkan efek psikologis yang sangat berat bagi korban. Kondisi emosi dan kepribadian secara umum mengalami guncangan berat, sehingga muncul kondisi tidak seimbang. Ketidakseimbangan terjadi karena informasi atau pengalaman yang diterima tidak sesuai dengan skema yang dimiliki.

### 1.5.1.4 Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.<sup>11</sup>

- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak diselenggarakan dengan baik dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak

---

<sup>11</sup> Maidin Gultom, *op cit*, h. 39

harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.<sup>12</sup>

c. Ancangan daur kehidupan (*life circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu diindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit<sup>13</sup>.

Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial atau keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 39

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 40

masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh risiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pra dewasa juga diperlakukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun anak-anak mereka.<sup>14</sup>

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengrusakan, sistem pendidikan yang menekankan hal-hal dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.<sup>15</sup>

Bahwa perlindungan anak adalah (hukum tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *ibid*

<sup>16</sup> Arif Gosita. *Op cit*, h. 53

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana dan peraturan lain yang menyangkut tentang anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.

Mengatakan Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlupendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>17</sup>

#### **1.5.2.5 Hak-Hak Dan Kewajiban Anak**

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mengesahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban meberikan yang terbaik bagi anak-anak. Selanjutnya Majelis Umum menghimbau para orang tua wanita dan pria secara perorangan organisasi sukarela, deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak yaitu:<sup>18</sup>

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa

---

<sup>17</sup> Maidin Gultom, *op cit*, h. 22

<sup>18</sup> Sahnty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Jogjakarta, 2004, h. 9.



membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.

2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan dan bermartabat.
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
4. Anak-Anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar supaya kepriadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak dibawah usia 5 (lima) tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak-anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadikan anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang

harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat, dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan pekerjaan anak-anak di bawah umur. Dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.
10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

#### **1.5.2.6 Hak-hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002**

##### **Tentang Perlindungan Anak.**

Pasal 4 :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 7 :

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 :

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.

Pasal 13 :

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
  - a. Diskriminasi;
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. Penelantaran;
  - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. Ketidakadilan; dan
  - f. Perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14 :

”Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Pasal 15 :

- Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
- a. Penyalagunaan dalam kegiatan politik;
  - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - e. Pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16 :

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 :

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - a.mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b.memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c.membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18 :

”Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

#### **1.5.1.8 Hak-hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.**

Pasal 52 :

1. setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara.
2. hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 58 :

1. setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut.
2. dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59 :

1. setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
2. dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.

Pasal 62 :

“setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental fisiknya”.

Pasal 66 :

1. setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
3. setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan

- harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
6. setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
  7. setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup.

### **1.5.3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

#### **1.5.2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia dinyatakan bahwa perihwal yang bersifat dan berarti keras, perbuatan seseorang yang membuat atau menyebabkan kerusakan fisik, baik orang lain, atau dengan paksaan.<sup>19</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT pada pasal 1 ayat (1) sebagai berikut :

”yang dimaksud dengan KDRT yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

#### **1.5.2.2 Hak-hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

##### **Tentang Perkawinan.**

Pasal 45 :

1. kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

---

<sup>19</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Pres, 1997, hal. 716

2. kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 49 :

1. salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :
  - a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. ia berkelakuan buruk sekali.
2. meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

### **1.5.3. Perlindungan hukum**

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 1 ayat (4) sebagai berikut :

”perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.”

#### **1.5.3.1 Pengertian upaya hukum**

Definisi upaya hukum adalah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atas kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam

undang-undang.<sup>20</sup> Upaya hukum juga dibagi menjadi 5 (lima) sebagai berikut :

1. Upaya Hukum Banding

Menurut KUHAP pasal 233 ayat (1) sebagai berikut :

”Banding yaitu banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu pada penuntut umum, seorang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi.”

2. Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Kasasi demi kepentingan hukum yaitu suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan.<sup>21</sup> Upaya hukum luar biasa, diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan putusan pengadilan selain putusan Mahkamah Agung.

3. Upaya Hukum Kasasi

Kasasi yaitu Pembatalan,<sup>22</sup> tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membentuk hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkat tertinggi.<sup>23</sup>

4. Upaya Hukum Grasi

---

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007 hal.241

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001. h. 292

<sup>22</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977. h.503

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, *op cit.* h.259



Grasi yaitu tindakan meniadakan hukuman, perubahan, peringanan, pengurangan, penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden.<sup>24</sup>

#### 5. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali yaitu suatu putusan pengadilan yang berkuatan tetap.<sup>25</sup>

Sedangkan upaya hukum dalam Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut :

Menurut pasal 14 menyatakan bahwa :

1. Hakim banding memeriksa dan memutuskan perkara anak dalam tingkat banding memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat banding sebagai hakim tunggal.
2. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.
3. Hakim banding dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang panitera pengganti

Sedangkan pasal 18 menyatakan :

1. Hakim kasasi memeriksa dan memutuskan perkara anak dalam tingkat kasasi sebagai hakim tunggal.
2. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.
3. Hakim kasasi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang panitera pengganti

Untuk peninjauan kembali terdapat dalam pasal 20 yang isinya :

“Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara anak nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak dan atau orang tua, wali, orang tua

---

<sup>24</sup> <http://www.upaya.hukumgrasi.org/voy/media/.com> pk1.11:13 WIB Tgl, 13 September 2009.

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, *op.cit.* h.276

asuh, atau penasihat hukumnya kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

#### **1.5.3.2 Pengertian Korban**

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga sebagai berikut:

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

#### **1.5.3.3 Pengertian Penganiayaan**

Penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak.

#### **1.5.4. Ketentuan Pidana**

1.5.4.1 Menurut KUHP pasal 351 tentang Penganiayaan ayat :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sesuai dengan pasal 354 ayat (1) KUHP

”Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.”

#### 1.5.4.2 Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 PKDRT tentang

sanksi pidana penganiayaan pasal 44 sebagai berikut :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45,000,000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5,000,000,00 (lima juta rupiah).

#### 1.5.4.3 Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan

Anak tentang sanksi pidana penganiayaan pasal 80 sebagai berikut :

1. setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 72,000,000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp100,000,000,00 (seratus juta rupiah).

Sedangkan upaya hukum dalam Undang-Undang Peradilan

Anak Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut :

Menurut pasal 14 menyatakan bahwa :

1. Hakim banding memeriksa dan memutuskan perkara anak dalam tingkat banding memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat banding sebagai hakim tunggal.
2. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.
3. Hakim banding dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang panitera pengganti

Sedangkan pasal 18 menyatakan :

1. Hakim kasasi memeriksa dan memutuskan perkara anak dalam tingkat kasasi sebagai hakim tunggal.
2. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.
3. Hakim kasasi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang panitera pengganti

Untuk peninjauan kembali terdapat dalam pasal 20 yang isinya :

“Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara anak nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak dan atau orang tua, wali, orang tua asuh, atau penasihat hukumnya kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis yaitu mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang

berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>26</sup>

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap dengan keadaan hukum ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan tipe penelitian hukum diskriptif.

#### 1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bila perlu bahan hukum tersier. Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim).<sup>28</sup>

Bahan penelitian ini terdiri dari beberapa perundang-undangan.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 1986, h. 51

<sup>27</sup> *Ibid*, h 51

<sup>28</sup> *Ibid*, h.52

<sup>29</sup> *Ibid*, h.52

Berdasarkan teori diatas, maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Hukum Pidana.
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### 1.6.3 Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).

#### 1.6.4 Bahan hukum tersier, yaitu :

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, (contohnya : Rancangan Undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).

## **1.7 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1.7.1 Metode pengumpulan data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah data sekunder yaitu studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, Undang-undang, KUHP, peraturan pemerintah yang berkenaan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.<sup>30</sup>

### **1.7.2 Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah “metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini<sup>31</sup>

### **1.7.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan dalam penelitian dipilih di instansi Surabaya Crisis Center Cahaya Mentari (SCCCM) Jalan Banyuwirip V No. 61 Surabaya, karena data-data lebih lengkap sehingga penulis lebih mudah dalam penyusunan skripsi ini.

## **1.8 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini adalah 10 (sepuluh) bulan, dimulai dari bulan September 2011 minggu ke tiga ke Polsek dukuh pakis, Polrestabes, bulan oktober ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk pengambilan berkas perkara,

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 69

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 69

sampai bulan januari 2011 ujian proposal, bulan pebruari penelitian di LSM Cahaya Mentari, LPA, bulan maret sampai dengan mei pembuatan skripsi dan bulan juni 2011 ujian skripsi.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan hasil penelitian penulisan skripsi dalam 4 (empat) bab, sebagai awal penulisan merupakan pendahuluan yang ditempatkan pada bab I, memaparkan latar belakang munculnya permasalahan yang menjadi kajian selain itu bab I menjadi awal dari penulisan skripsi yang menerangkan hal yang paling utama sebagai pemaparan keadaan yang terjadi berisikan hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan anak.

Bab II ini membahas tentang permasalahan yang pertama, tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban KDRT dalam kasus David.

Bab III pembahasan terhadap permasalahan yang terakhir karena dalam bab ini akan membahas tentang bentuk upaya hukum anak sebagai korban KDRT dalam kasus David.

Bab terakhir dari penulisan ini adalah bab IV karena bab ini merupakan kesimpulan dari semua pembahasan permasalahan diatas, dan memberikan saran terhadap semua permasalahan yang telah dibahas oleh penulis, dengan beberapa harapan serta masukan guna mempertegas dari pembahasan permasalahan skripsi.



Pemaparan sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk membantu mempermudah pemahaman pada keseluruhan dari skripsi.

